DINAMIKA INTERPRETASI HAKIM DALAM MENETAPKAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK

Tuti Ningrum
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tutiningrum87@gmail.com

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala perkara hukum diatur di Pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenanga untuk menangani perkara hukum masyarakat pada umumnya, sedangkan Pengadilan Agama (PA) khusus menangani perkara hukum perdata Masyarakat Muslim. Hal tersebut diatur dalam undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 Pada pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan yang di dalamnya terdapat tentang menangani pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim menjadi kewenangan absolut PA, sedangkan pengangkatan anak oleh warga non muslim menjadi kewenangan absolut PN. Namun demikian, realitasnya pengangkatan anak oleh Masyarakat Muslim lebih banyak dilakukan di PN dari pada di PA. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat bagaimana Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat Muslim Sleman. Apakah praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada? Mengapa Masyarakat Muslim Sleman masih mengajukan permohonan pengangkatan anak di PN.

Kata kunci : Pengangkatan Anak, Masyarakat Muslim

I. Pendahuluan

Hukum keluarga (perdata) yang berlaku di Indonesia ada 2 golongan yaitu: (1) Hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Semua urusan keperdataan bagi masyarakat muslim diselesaikan oleh Pengadilan Agama (PA); (2) Hukum positif berlaku untuk mereka Non Muslim. Semua urusan perdata diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (PN).

Berdasarkan pembagian hukum tersebut, idealnya urusan hukum antar masyarakat muslim di Pengadilan Agama sesuai dengan UUPA pasal 2 yang berbunyi:

“pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”¹

Perubahan Undang-Undang No 3 tahun 2006 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang perubahan kekuasaan absolut Peradilan Agama permohonan pengangkatan anak yang subyek hukumnya orang Islam. diatur dalam pasal 49 dan 50. Namun pada kenyataannya masyarakat muslim masih banyak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan UU no 3 tahun 2006 sudah jelas bahwa pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan PA.

Dari beberapa kasus pengangkatan anak yang peneliti temukan, peneliti ingin lebih jauh meneliti. Apa yang menyebabkan masyarakat Muslim Sleman melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Padahal kewenangan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sudah diatur sejak tahun 2006, menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama .

Ketika kewenangan pengangkatan anak masih diperebutkan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, karena di Pengadilan Negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam. Sedangkan kewenangan pengangkatan anak sudah menjadi wewenang pengadilan agama.

Penelitian ini membahas tentang pemahaman para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim Sleman. Peneliti juga akan meneliti adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pemohon didalam pengajuan permohonan pengangkatan anak di pengadilan Negeri Sleman. Kajian ini dianalisis dengan teori kewenangan dan kesadaran hukum.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 2.

II. Pengertian Anak Angkat

Untuk mengetahui pengertian Pengangkatan anak dalam bahasa Inggris disebut “adoption”² dan dalam bahasa Arab disebut “*tabanny*”³. Sedangkan pengertian pengangkatan anak dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, anak angkat adalah anak orang lain yang dibesarkan seperti anak kandung dan disahkan secara hukum.⁴ Pengertian pengangkatan anak yang diatas adalah mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak kandung, pengangkatan anak dalam hal ini berakibat hukum memutus nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta saling mewarisi.⁵

III. Prosedur Pengangkatan Anak di PA

Untuk memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas pengangkatan anak yang telah dilakukan, baik bagi orang tua angkat ataupun anak angkatnya, haruslah dilakukan legalisasi kepada Pengadilan.⁶

Sebelum lahirnya undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama kurang jelas dan sangat terbatas, namun setelah lahirnya UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006, jo UU No. 50 tahun 2009. Maka eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah jelas dan luas sebagai Lembaga Peradilan bagi Umat Islam bangsa Indonesia dibidang hukum perdata keluarga.⁷

² Yohn M. Echols dan Hassan Shadily, kamus bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.13.

³ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawwir), hlm. 121.

Yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya anak kandung.

⁴ Peter saliman dan yenny Salim, kamus besar bahasa Indonesia kontemporer, cet. Ke-1 (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 58.

⁵ Musthofa., pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama, (Jakarta: kencana , 2008), hlm, 18-19.

⁶ Syarat-syarat pengangkatan anak

⁷ Pasal 49 UU no.7 tahun 1989, jo UU No. 3 Tahun 2006, jo UU No.50 Tahun 2009. Ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh.

Semenjak tahun 2006 masyarakat muslim sudah mulai mengajukan permohonan pengangkatan anak ke PA. Prosedur pengangkatan anak Melihat realita dalam masyarakat kebanyakan yang melakukan pengangkatan anak di PA adalah Pengangkatan anak Privat. Pengangkatan anak secara privat, merupakan pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat (COTA) langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat di Pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dengan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu COTA harus membuat permohonan kepada kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke COTA untuk memperoleh gambaran COTA layak melakukan pengangkatan anak, tetapi kebijakan dari PA “jika pengangkatan anak dilakukan secara privat, maka tidak diperlukan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Karena pengangkatan anak yang secara langsung sudah jelas orang tua kandungnya. Tetapi jika anak angkat diambil dari sebuah Yayasan maka wajib meminta surat rekomendasi dari Dinas Sosial.”⁸

Pengadilan Agama Sleman menerima pengangkatan anak secara langsung (*private adoption/ independen adoption*). Tetapi Prosedur dari Pengadilan Agama mempunyai Kebijakan yaitu Pengadilan Agama Sleman prosedurnya tidak harus melalui Dinas Sosial atas perizinannya.⁹ Jika anak diambil sudah diketahui orang tua kandungnya (*private adoption*). Tetapi sebaliknya jika anak diambil dari sebuah Yayasan, maka harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Maka Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu: 1. pemohon yang sudah mengetahui bahwa pengangkatan anak yang dilakukan seorang muslim diajukan ke Pengadilan Agama, dan 2. Pemohon tidak mengetahui bahwa pengangkatana anak seorang muslim sudah menjadi kewenangan PA.

⁸ Wawancara dengan Drs. Wahyudi, hakim pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 Desember 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Wahyudi, hakim Pengadilan Agama pada tanggal 5 Desember 2018.

IV. Prosedur dan Kasus Pengangkatan Anak di PN

Prosedur pengangkatan anak yang diajukan oleh seorang muslim, mereka melalui prosedur yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang menyatakan bahwa prosedur pengangkatan anak harus di pengadilan dan sebelumnya wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Calon Orang Tua angkat tunggal pertama kali harus datang kepada Instansi Sosial setempat dan menyampaikan tujuan melakukan permohonan pengangkatan anak. Setelah dinas sosial memeriksa dan menelaah, sementara COTA diarahkan ke panti, atau Yayasan yang diberi izin atau ditunjuk oleh Gubernur untuk Proses pengangkatan anak.

1. Putusan pengadilan Negeri No. 25/Pdt.P/ 2018/Pn. Smn.¹⁰

Harry sebagai Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PN. Pemohon sudah menikah selam 13 tahun, dalam pernikahannya tersebut pemohon belum dikaruniai anak. Pemohon ingin sekali mendapatkan anak dan bersepakat untuk mengangkat anak dari badan sosial yaitu Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY. Sejak tanggal 3 juli 2013 pemohon sudah mengasuh seorang anak perempuan bernama DIVA selama 5 tahun sejak anak berusia 1 tahun 1 bulan. Setelah mengasuh anak DIVA istri pemohon meninggal dunia.

Sehubungan dengan SEMA tersebut, keputusan menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 menagtur tentang persyaratan calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yaitu berstatus kawin, kasus ini ibu calon anak angkat sudah meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa selama perawatan pemohon, anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga dan anak mendapatkan pendidikan

¹⁰ Putusan pengadilan Negeri No. 25/Pdt.P/ 2018/Pn. Smn.

dengan kasih sayang dan perawatan yang lebih baik, hal tersebut telah dibuktikan oleh pengurus Yayasan sayap ibu dan petugas Dinas Sosial DIY.

Pengangkatan anak yang dilakukan seorang single parent. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan WNI terhadap anak WNI diaman orang tua angkat bestatus orang tua tunggal. Alur pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:¹¹

Menimbang, bahwa emohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dimana permohonan tersebut telah berdasar hukum yaitu:

- a. SEMA No.2/1979 jo SEMA No.6/1983 jo SEMA No.4/1989 jo SEMA No.2/2009;
 - b. PP No.54/2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Pasal 39 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lenih lanjut;
 - d. Permensos RI No.110/HUK/2009 Tentang Pengangkatan Anak
2. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 82/Pdt.P/2017/PN. Smn

Pemohon (Calon orang tua angkat) bernama AG dan DN keduanya suami istri sah pernikahannya sejak tanggal 17 Juli 2005 yang dicatatkan di KUA Bantul sesuai dengan kutipan surat nikah No. 390/39/VII/2005. Pekerjaan wiraswasta, umur 38 dan istri 43 tahun tempat tinggal di Yogyakarta. Mengajukan permohonan Pengangkatan anak laki-laki keturunan muslim oleh orang tua angkat Muslim ke Pengadilan Negeri.

Kedua suami istri tersebut sudah 12 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, maka keduanya telah bersepakat untuk mengangkat anak dari suatu badan sosial. Sejak tanggal 25 November 2015 pasangan suami

¹¹ Direktori JENDERAL Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Direktori Bian Pelayanan Sosial Anak, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Jakarta; Departemen Sosial, 2005), hlm, 25.

istri sudah mengasuh anak tersebut yang bernama Li lahir pada tanggal 29 April 2015 dari Yayasan Sayap Ibu cabang DIY. Jadi sudah mengasuh 2 tahun selama masa perawatan anak tersebut. Para pemohon mendapat persetujuan dari seluruh keluarga dan pengangkatan anak secara adat sudah dilakukan. Dan sudah mendapat surat izin dari Dinas Sosial DIY Nomor : 188/112211/II.3 tertanggal 20 November 2017. Para pemohon selama merawat anak tersebut, anka mendapatkan pendidikan dengan kasih sayang dan perawatan yang lebih baik, hal tersebut dibuktikan oleh saksi dari pengurus Yayasan Sayap Ibu dan petugas Dinas Sosial.

Para pemohon mengajukan pengangkatan anak dengan menunjukkan beberapa surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan. Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan beberapa surat, yaitu:

Keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon sudah lama telah membina rumah tangga, tetapi sudah 12 tahun belum juga dikarunia keturunan, dan pemohon sungguh-sungguh bermaksud mengangkat anak laki laki yang bernama Li yang sudah diasuh oleh pemohon sejak anak berusia 3 bulan. Selama masa perawatan para pemohon mendapatkan persetujuan dari keluarganya, dan Sekarang sudah 3th 8 bulanan. Pemohon meyelesaikan prosedural sesuai dengan prosedur dari selama proses penyelesaian prosedural yang diarahkan oleh dinas sosial dan panti Yayasan Sayap ibu.

Dalam hal ini, pemohon tidak mengetahui bahwa kewenangan pengangkatan anak yang beragama Islam sudah menjadi kewenangan PA. Pengajuan permohonan pengangkatan anak ke PN dengan keinginan sendiri dan diarahkan oleh dinas sosial.¹² Dalam hasil wawancara singkat dengan pemohon, Tuan AG mengaku bahwa tidak terlalu paham tentang kewenangan PA menangani pengangkatan anak secara hukum Isalam.

¹² Wawancara dengan Tuan AG, pihak Pemohon dalam Perkara pengangkatan anak No. 82/Pdt.PP/2017/PN. Smn, tanggal 13 Juli 2019

Seluruh keluarga juga mendukung pengangkatan anak . “termasuknya saya prosesnya terlambat selama 2 tahun baru selesai ” dalam melalui proses mengajukan pengangkatan anak jalur dari dinsos ke panti survey , tidak ada mengarahkan ke PA. Dan ketika peneliti wawancara dengan hakim yang menetapkan permohonan pengangkatana anak yang dilakukan oleh tuan AG, hakim juga tidak mengetahui tentang kewenangan PA.¹³

Pemohon mulai mengajukan permohonan pengangkatan anak dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pemohon tidak mengetahui tentang kewenangan PA tentang pengangkatan anak yang beragama Islam sudah menjadi kewenangna absolut PA. Salah satu Akibat hukum permohonan pengangkatan anak di PN adalah saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua.. dalam amar putusan “Bahwa para pemohon bersedia memberikan kepada Li (anak angkat) tersebut segala hak keperawatan, pendidikan dan sebagainya sampai dengan hak waris anak tersebut seperti anak kandung dan pemohon akan menganggap sebagai anak kandung sendiri”. “Bahwa penetapan PN Sleman pemohon perlukan agar kedudukan anak angkat para pemohon mendapatkan kepastian hukum yang kuat”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan ada beberapa pemohon yang melakukan pengangkatan anak tidak mengetahui orang tua kandungnya karena diambil dari sebuah Yayasan, dari Yayasan sudah mempunyai pemahaman hukum yang melembaga yaitu penetapan pengangkatan anak diajukan ke PN.¹⁴

V. Kecenderungan dan alasan masyarakat memilihi penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri

Undang-undang tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

¹³ Wawancara dengan Rakhmad Dwi Nanto, Hakim PN Sleman, tanggal 4 februari 2019

¹⁴ Wawancara dengan Tuan AG, pihak Pemohon dalam Perkara pengangkatan anak No. 82/Pdt.PP/2017/PN. Smn, tanggal 13 Juli 2019

merupakan rangkaian yang tidak putus demi terlindungnya hak-hak anak. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama dan berkembang dalam suatu masyarakat tersebut, baik bagi masyarakat desa ataupun masyarakat perkotaan. Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai motif diantaranya untuk mendapatkan keturunan, sebagai pancingan agar dapat memiliki anak dan banyak motif lainnya.

Kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. PN atau PA dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan.

Kekuasaan peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 baik menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun Menurut Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi luas.¹⁵ Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewenangan pengangkatan anak masyarakat Muslim sudah menjadi kewenangan absolut PA, dan masyarakat muslim mulai mengajukan permohonan pengangkatan anak ke PA, namun masih ada masyarakat Muslim yang mengajukan pengangkatan anak ke PN dengan alasan tertentu, yaitu sebagai berikut;

¹⁵ Linda Firdawaty, Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No.5 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama. Jurnal Al-'Adalah Vol.X., No.2 Juli 2011. Hlm. 220.

1. Ketidaktahuan Masyarakat tentang Kewenangan PA

Pemahaman masyarakat yang belum mengetahui tentang kewenangan PA dalam menangani penetapan pengangkatan anak bagi masyarakat muslim, dikarenakan belum adanya sosialisasi.¹⁶

Sejak tahun 2006 Pengadilan Agama(PA) mempunyai kewenangan yang lebih luas yaitu menerima kasus pengangkatan anak. Sesuai kekuasaan absolut Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Namun demikian beberapa menyatakan bahwa kewenangan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Hasil Wawancara dengan pemohon AG dan DN mereka mengajukan permohonan ke PN karena tidak mengetahui tentang kewenangan PA. Karena prosedur dari yayasannya dan dinsos mengarahkan untuk mengajukan permohonannya ke PN. Walaupun pak agus ada seorang muslim dan calon anak angkat juga beragama Islam.

Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki PN dan PA terhadap permohonan pengangkatan anak, dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga pengadilan tersebut. Masyarakat berpegang teguh pada hukum yang sudah melembaga yaitu dimana PN sudah lama menangani perkara penetapan pengangkatan anak walaupun calon orang tua angkat (COTA) dan calon anak angkat beragama Islam.

¹⁶ Wawancara dengan Drs. Ambari, Msi. Hakim PA Sleman, tanggal 8 Juli 2019

Aturan teknis prosedural pengangkatan anak adalah berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam SEMA RI No 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan SEMA No.6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak kemudian diesmpurnakan lagi dengan SEMA No.4 tahun 1989. Dengan keluarnya PP No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak dilakukan dengan berpedomana pada ketentuan SEMA No. 6 tahun 1983 jo PP No. 4 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak yang semuanya bersifat melengkapi.¹⁷

Menurut hukum Islam status anak angkat tidak sama dengan anak kandung, anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Hal ini berdasarkan pasa pasal noor 4 menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya. Demikina pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetep bukan sebagai mahram orang tua ngkat.

Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris tapi anak angkat dapat menerima wasiat sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Konsepsi pengangkatan anak menurut Hukum Islam dengan mengambil anak orang lain untuk memelihara dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan perhatian seperti anak sendiri tanpa diberikan status anak kandung kepadanya.

Dari berbagai aturan tersebut harus dipilih mana yang masih berlaku setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, dan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007.

¹⁸ Bunyi pasal 209 KHI

mana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam pengangkatan anak. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial RI 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan anak maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan SEMA No.6 tahun 1983 jo PP No.54 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan anak yang semuanya bersifat melengkapi.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa Masyarakat Muslim ada yang tidak mengetahui kewenangan PA bagi masyarakat yang beragama muslim harus melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

Pada realitanya terdapat perbedaan di dalam keputusan mengenai pengangkatan anak di PA dan di PN. Fenomena yang menyebabkan masyarakat lebih memilih ke PN dan tidak mau mengajukan permohonan ke PA adalah karena PN memberikan hak kewarisan dan calon orang tua angkat menginginkan keputusan tersebut. padahal proses dan tujuan tersebut melanggar hukum Islam dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya PN dan PA tidak memiliki dasar hukum yang sama. Oleh karena itu akibat hukumnya juga berbeda. Maka di PA tabanni adalah haram dalam hukum Islam karena hal tersebut bertentangan dengan hakekat yang sebenarnya. Allah tidak akan menjadikan orang tua angkat yang mengangkat anak itu menjadikan anak kandungnya, mereka adalah anak orang tua kandungnya yang melahirkannya oleh karena itu tabanni hukumnya adalah haram.²⁰

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007.

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 233.

2. Mereka menginginkan kejelasan hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Indikator kesadaran hukum merupakan Kejelasan hukum yang diinginkan pemohon karena ingin menjadikan anak angkatnya mempunyai hak waris. Walaupun dia anak angkat tetapi ingin yang terbaik bagi anak. Masyarakat Muslim Sleman **bahwa sebenarnya mereka mengerti tentang aturan-aturan hukum** pengangkatan anak yang beragama Islam itu adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, akan tetapi mereka lebih memilih mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, karena hasil putusannya meneurut mereka sesuai nilai keadilan dan ingin mempunyai anak angkat yang menjadi anak kandung, para pemohon sangat senang sekali mendapat anak jadi orang tua angkat akan menganggap anak angkat menjadi anak kandung.

3. Demi Kepastian Hukum dalam Kewarisan

Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kewarisan atas pengangkatan anak masyarakat muslim melakukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri yang memberikan hak waris pada anak angkat. Dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat dalam hukum Islam tidak saling mewarisi, karena anak angkat itu bukan termasuk anak kandung, anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Anak angkat menurut sayrai'at Islam bahwa sumber-sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi

VI. PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dari data-data di lapangan, Dengan adanya peraturan tentang kewenangan absolut PA dalam menangani pengangkatan anak

bagi orang Islam. Masyarakat muslim sudah mulai mengajukan ke PA walupun masih sedikit dikarenakan masyarakat muslim masih banyak yang tidak mengetahui tentang kewenangan tersebut dan PN masih menerima penetapan pengangkatan anak yang sudah menjadi kewenangan PA.

Kecenderungan masyarakat Muslim di Sleman masih memilih PN sebagai lembaga hukum yang menangani penetapan pengangkatan anak. Dikarena PN adalah lembaga hukum yang sudah lama menangani penetapan pengangkatan anak dan menurut masyarakat muslim ternyata menyadari hukum itu kepentingan untuk dirinya, kepentingannya untuk kesejahteraan anak yang berdasar dengan tujuan pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Indikator kesadaran hukum merupakan Kejelasan hukum yang diinginkan pemohon karena ingin menjadikan anak angkatnya mempunyai hak waris. Walaupun dia anak angkat tetapi ingin yang terbaik bagi anak. Masyarakat Muslim Sleman **bahwa sebenarnya mereka mengerti tentang aturan-aturan hukum** pengangkatan anak yang beragama Islam itu adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, akan tetapi mereka lebih memilih mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, karena hasil putusannya meneurut mereka sesuai nilai keadilan dan ingin mempunyai anak angkat yang menjadi anak kandung, para pemohon sangat senang sekali mendapat anak jadi orang tua angkat akan menganggap anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris KHI mengakomodir tentang hak anak angkat dapat menerima wasiat wajibah. Dalam hal ini mereka tidak mengetahui ketentuan hukum Islam dengan baik. Pada realitanya dalam keputusan penetapan pengangkatan anak di PN memberikan hak kewarisan kepada anak angkat dan pemohon (COTA) menginginkan keputusan tersebut.

Daftar Pustaka

Direktori JENDERAL Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Direktori Bian Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (Jakarta; Departemen Sosial, 2005)

Linda Firdawaty, *Analisis Terhadap UU No 3 Athun 2006 dan UU No.5 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*. Jurnal Al-‘Adalah Vol.X., No.2 Juli 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawwir)

Musthofa., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: kencana , 2008).

Putusan pengadilan Negeri No. 25/Pdt.P/ 2018/Pn. Smn.

Salim, Peter saliman dan yenny, *kamus besar bahasa Indonesia kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : Modern English Press, 1991)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU no.7 tahun 1989, jo UU No. 3 Tahun 2006, jo UU No.50 Tahun 2009.

Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*.

Yohn M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1984).